

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:23 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:22**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 19 Nopember 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Februari 1975 tentang Pengu-
rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process and the statistical techniques employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied, which supports the hypothesis that was tested.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings for future research and practice. It suggests that the results of this study could be used to inform policy decisions and to guide the development of new programs and initiatives.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key points. It reiterates the importance of the study and the need for further research in this area.

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. The first part of the report deals with the general situation in the country and the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey in the different regions of the country.

3. The third part of the report deals with the results of the survey in the different sectors of the economy.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey in the different social groups.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey in the different political groups.

6. The sixth part of the report deals with the results of the survey in the different cultural groups.

7. The seventh part of the report deals with the results of the survey in the different religious groups.

8. The eighth part of the report deals with the results of the survey in the different ethnic groups.

9. The ninth part of the report deals with the results of the survey in the different linguistic groups.

Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2/KPTS-DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 1999-2004.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah Rapat-rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Dasarkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
570-579 tanggal 14 April 1987 tentang
Penggunaan Sistem Bilik dalam Belanja-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara serta Petunjuk Teknik Tata Usaha
Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah;

24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuningin Nomor 2/KPTS-DEK/1999
tanggal 6 September 1999 tentang Teratai
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kuningin Periode 1999-
2004.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1989 tanggal 11 Februari
1989 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1989/2000.

2. Rincian Rapat-rapat Pieno Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningin mengenai Pembahasan Rancu-
sian Peraturan Daerah tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUNINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 154.825.796.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 154.825.796.000,00

b. BELANJA :

- Rutin.....Rp. 134.939.901.000,00

- Pembangunan Rp. 19.885.895.000,00

Rp. 154.825.796.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

(1) Pendapatan Rp. 12.750.392.000,00

(2) Belanja Rp. 12.750.392.000,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.

REVISI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KESAMPAN TENTANG
 ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah Rp. 154.825.755.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 154.825.755.000,00
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 134.939.901.000,00
- Pengembangan	Rp. 19.885.854.000,00
	Rp. 154.825.755.000,00

Pasal 2

Revisi Anggaran Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- (1) Pendapatan
- (2) Belanja

Pasal 3

- (1) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kesampan pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kesampan pada Pasal 2, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:

- a) Lampiran III : Pendapatan.
- b) Lampiran IV : Belanja Rutin.
- c) Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagai
sistematika lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:

- a) Lampiran III : Pembahasan
- b) Lampiran IV : Belanja Rutin
- c) Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada
Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan
Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Per-
aturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai awal tahun
sebagai

Agar supaya setiap orang dapat mengesekutnya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah sebagai
dan kemudian.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI KEBUMEN

2000

EUSTALINISIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 23 Seri D Nomor 22 pada tanggal 29
Desember 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2001

Dalam Ribuan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
I.	PENDAPATAN		II.	BELANJA	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN - YANG LALU.	5,677,907	A.	RUTIN.	
	Jumlah 1 :	5,677,907	1.	Belanja DPRD.	1,600,800
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.		2.	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	248,760
a.	Pajak Daerah.	1,800,500	3.	Belanja Pegawai.	116,996,779
b.	Retribusi Daerah.	4,216,296	4.	Belanja Barang.	6,096,711
c.	Bagian Laba Usaha Daerah.	186,497	5.	Belanja Pemeliharaan.	1,180,332
d.	Lain-lain Pendapatan.	1,630,110	6.	Belanja Perjalanan Dinas.	339,387
	Jumlah 2 :	7,833,403	7.	Belanja Lain-lain.	2,636,856
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.		8.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga.	192,504
a.	Bagi Hasil Pajak.	3,789,602	9.	Belanja Pensiun dan Onderstand.	0
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	28,000	10.	Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.	2,868,984
c.	Dana Rutin Daerah.	119,378,111	11.	Pengeluaran-pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian lain.	555,250
d.	Dana Pembangunan Daerah.	17,179,903			

KEMENTERIAN
KEPERAWATAN DAN BELAJAR
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2001

Lampiran

NO	URAIAN	Jumlah Rp	NO	URAIAN	Jumlah Rp
1.	PERALATAN		11.	Belanja	
1.	BAGIAN SIGA LESIH PERHIL- TUNGGAN ANGGARAN TAHUN YANG LAIN	5.677.907	1.	Belanja Bahan	1.100.800
			2.	Belanja Kebutuhan Lain-lain dan Wakil Kebutuhan Lain-lain	148.700
			3.	Belanja Pegawai	118.800.710
			4.	Belanja Barang	6.000.711
			5.	Belanja Pemeliharaan	1.100.310
			6.	Belanja Perjalanan Dinas	228.287
			7.	Belanja Lain-lain	2.000.700
			8.	Kegawatan Penderitaan Hutan dan Buruk	100.000
			9.	Belanja Penderitaan dan Gawat	0
			10.	Gawat, Gawat dan Gawat	2.000.000
			11.	Gawat, Gawat dan Gawat	22.000
				Gawat, Gawat dan Gawat	118.300.111
				Gawat, Gawat dan Gawat	17.100.000

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
	e. Penerimaan Lainnya	938,870	12.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	2,187,538
	Jumlah 3 :	141,314,486		Jumlah A :	134,939,901
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.		B.	PEMBANGUNAN.	
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat.	0	1.	Sektor Industri	65,000
	b. Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	0	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	979,948
	Jumlah 4 :	0	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	0
			4.	Sektor Tenaga Kerja.	142,000
			5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha, Keuangan Daerah & Koperasi.	676,000
			6.	Sektor Transportasi.	5,965,000
			7.	Sektor Pengembangan dan energi.	300,000
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.	517,241
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	909,650
			10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	1,724,416
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperca-	2,852,386

NO.	NAME	DATE	AMOUNT	REMARKS
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
				yaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	15,462
			13.	Sektor Kesehatan, Kese- jahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	889,757
			14.	Sektor Perumahan dan Pe- mukiman.	1,462,500
			15.	Sektor Agama.	358,684
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan teknologi.	62,500
			17.	Sektor Hukum.	90,000
			18.	Sektor Aparatur Pemerin- tah dan Pengawasan.	2,764,351
			19.	Sektor Politik, Penerang- an, Komunikasi dan Media Masa.	75,000
			20.	Sektor Keamanan dan Ke- tertiban Umum.	36,000
				Jumlah Murni : 20 Sektor	19,885,895
				Jumlah B :	19,885,895
	JUMLAH PENDAPATAN :	154,825,796		JUMLAH BELANJA :	154,825,796

